KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penegakan hukum jangan pakai kacamata kuda
Tanggal : Jumat, 08 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

PEMERIKSAAN MUHAIMIN

Penegakan Hukum Jangan Pakai Kacamata Kuda

SESUAI janjinya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memenuhi panggilan KPK, kemarin, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012.

Dalam pemeriksaan itu, Cak Imin mengaku memberikan semua informasi yang diketahuinya sekaligus membeberkan tersangka dalam perkara tersebut. Ia berharap keterangannya bisa mempercepat penanganan perkara. "Moga-moga dengan penjelasan ini, KPK semakin lancar dan cepat, tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi," sindir Cak Imin seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pemanggilan Muhaimin oleh KPK mendapat sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, KPK tibatiba mengusut kasus lama yang diduga menyeret nama mantan Menakertrans tersebut, tak lama setelah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bakal capres dan cawapres.

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menilai tindakan KPK sarat muatan politik karena dilakukan seusai deklarasi Cak Imin bersama Anies. "KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 11 tahun lalu bukan politisasi, tapi logika sederhana terasa aneh. Kenapa kasus 11 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi bacawapres PS tidak diproses? Kalau diproses, kenapa baru dipanggil sekarang?" kata Hamdan lewat unggahan di akun *X*, Rabu (6/9) malam.

> "Pasangan ini kan memang diincar, ya. Kita lihat Anies Baswedan berkali-kali diperiksa, tapi tidak ditemukan bukti. Sekarang Cak Imin yang dikejar. Enggak salah kalau diartikan ada unsur politik."
>
> **Saut Situmorang**
> Eks Komisioner KPK

Ia menyebut penegakan hukum wajib dilakukan, tapi harus dengan mempertimbangkan rasa keadilan. "Persoalan ini bukan saja hukum *an sich*, kacamata kuda. KPK boleh menyatakan hukum harus ditegakkan kepada siapa pun, tapi hukum punya hati dan jiwa. Hati yang melihat kondisi, situasi, dan rasa keadilan," ungkapnya.

Mantan komisioner KPK Saut Situmorang juga berpandangan sama bahwa pemeriksaan lembaga antirasuah itu terhadap Muhaimin kental unsur politik. "Ya enggak salah kalau masyarakat menilai ini ada unsur politik. Naluri saya pun mengatakan demikian," ujarnya, kemarin.

"Pasangan ini kan memang diincar, ya. Kita lihat Anies Baswedan berkali-kali diperiksa, tapi tidak ditemukan bukti. Sekarang Cak Imin yang dikejar. Enggak salah kalau diartikan ada unsur politik," sambungnya.

Sementara itu, PKB masih berpikiran positif atas pemanggilan ketua umumnya oleh KPK. "Kami masih *positive thinking* bahwa ini proses biasa," tegas Ketua DPP Bidang Informasi PKB Ahmad Iman Syukri atau Cak Iman kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ia juga berharap dugaan adanya upaya penjegalan atau politisasi terhadap Muhaimin hanyalah isu belaka. "Mudah-mudahan dugaan penjegalan atau politisasi itu tidak benar," terang Cak Iman.

Di sisi lain, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak ada nuansa politik dalam pemeriksaan Muhaimin. "Sehingga jangan ada yang membangun opini lain," ujarnya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. (Can/Ykb/Van/Ant/MGN/X-3)